

**PENGARUH PERUBAHAN KEBIJAKAN PASCA POLITIK
SAKOKU PADA MASYARAKAT JEPANG**

**Skripsi sarjana ini diajukan sebagai
salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana**

Oleh

ARNOLDUSANGGIWIRANDA

NIM: 13119001



PROGRAM STUDI BAHASA DAN SAstra JEPANG

FAKULTAS SAstra

UNIVERSITAS DARMA PERSADA

2014

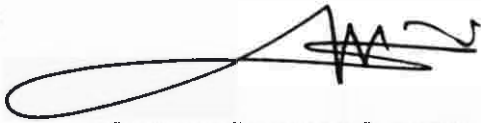
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan pada hari selasa tanggal 18 Februari 2014

Panitia Ujian :

Ketua

Pembimbing I

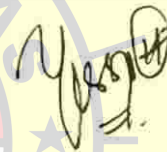


(Syamsul Bachri, S.S, M.Si)



(Dr. Nani Dewi Sunengsih, S.S, M.Pd)

Pembaca



(Yessy Harun, S.S, M.Pd)

Skripsi ini telah disahkan pada hari selasa tanggal 18 Februari 2014 oleh:

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Sastra

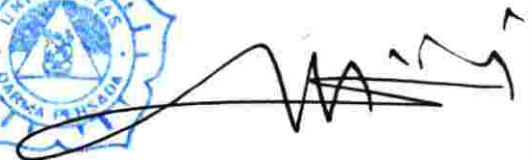
Bahasa dan Sastra Jepang



(Hari Setiawan, S.S, M.A)



FAKULTAS SASTRA



(Syamsul Bachri, S.S, M.Si)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Perubahan Kebijakan Pasca Politik Sakoku pada Masyarakat Jepang” untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-I jurusan Sastra Jepang, Fakultas Sastra, Universitas Darma Persada.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nani Dewi Sunengsih, S.S, M.Pd, selaku pembimbing yang selama ini telah banyak meluangkan waktu, perhatian yang besar untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini ditengah kesibukannya;
2. Ibu Yessy Harun, S.S, M.Pd, selaku Pembaca Skripsi;
3. Ibu Erni Puspitasari, S.S, selaku Pembimbing Akademik;
4. Bapak Syamsul Bachri, S.S, M.Si, selaku Dekan Fakultas Sastra Jepang Universitas Darma Persada;
5. Bapak/Ibu Tim Penguji;
6. Bapak Hari Setiawan, S.S, M.A, selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jepang Universitas Darma Persada;

7. Ibu Riri Hendriati, S.S. M.Si, selaku Sekertaris Jurusan Bahasa dan Sastra Jepang Universitas Darma Persada;
8. Kedua orang tua saya yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan perhatiannya, adik dan saudara-saudara yang telah memberikan dukungan sampai sekarang.
9. Seluruh staff pengajar dan karyawan Fakultas Sastra Universitas Darma Persada;
10. Seluruh staff Perpustakaan Universitas Darma Persada;
11. Seluruh sahabat dan teman-teman, serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membaca dan ingin mengembangkan pembahasan mengenai sejarah dan kebudayaan Jepang di kemudian hari.

Salam Sejahtera.

Jakarta, Januari 2014

Penulis

ABSTRAK

PENGARUH PERUBAHAN KEBIJAKAN PASCA POLITIK SAKOKU PADA MASYARAKAT JEPANG.

Program studi Bahasa dan Sastra Jepang Fakultas Sastra

Universitas Darma Persada

Jakarta, Januari 2014.

Arnoldus Anggi Wiranda

13119001.

Kebijakan politik Sakoku yang dilakukan Jepang pada awalnya bertujuan untuk meredam pengaruh asing yang masuk ke Jepang, tetapi pasca kebijakan Politik Sakoku, pemerintah Jepang mengubah kebijakan menjadi belajar dari Barat. Kebijakan ini membawa pengaruh terhadap kebudayaan, adat istiadat, tata cara kehidupan, ilmu pengetahuan, kesenian dan cara berpikir orang Jepang. Akibat dari pengaruh-pengaruh kebudayaan baru yang muncul, secara tidak langsung menimbulkan gejala yang buruk. Bentuk-bentuk kebudayaan telah membuat masyarakat Jepang mengalami krisis identitas karena harus hidup diantara dua kebudayaan yang berbeda.

ちゆうしょうか
抽象化

にほんしゃかい たい せいじてきさこくじだいごせいさくか えいきょう
日本社会に対して政治的鎖国時代後政策化の影響

だいがくぶんがくぶにほんごがっか
ダルマプルサダ大学文学部日本語学科

ジャカルタ、2014年1月作成 さくせい

アルノーデウス・アンギ・ウィランダ

13119001

にほん せいじてきさこく さいしよ かいがい えいきょう け ため せいじ
日本では政治的鎖国というのは最初に海外から影響を消す為の政治です。

せいじてきさこくじだいご にっぽんせいふ べいこく まな せいさく へんか
だが、政治的鎖国時代後、日本政府が米国から学ぶという政策を変化した。

せいさくか にほんじん ぶんか せいかつ ちしき かんが かつ げいじゆつ えいきょう
この政策化は日本人の文化や生活や知識や考え方や芸術などを影響して

しんぶんかへんか なる えいきょう しんぶんかけい
います。この新文化変化はすぐに悪い影響をしていないがこの新文化形は

にほんじん ぶんか なか せいかつ こま
日本人が2つの文化の中に生活するのがアイデンティティのクライシスで困

っています。

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| BABI PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi MASAIAH | 4 |
| C. Batasan Masalah | 5 |
| D. Perumusan Penelitian | 5 |
| E. Tujuan Penelitian | 5 |
| F. Metode Penelitian | 6 |
| G. Landasan Teori | 6 |
| H. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II POLITIK SAKOKU PADA KESHOGUNAN | |
| A. Awal Berdirinya Keshogunan | 9 |
| B. Keshogunan Kamakura | 10 |
| C. Keshogunan Muromachi | 12 |

| | |
|--|----|
| D. Keshogunan Tokugawa | 13 |
| 1. Politik Sakoku | 15 |
| 2. Latar Belakang Politik Sakoku | 15 |
| 3. Tujuan Politik Sakoku | 17 |

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Perkembangan yang Terjadi pada Masa Politik Sakoku | 22 |
| B. Dampak Politik Sakoku | 28 |
| C. Pembukaan Negara dan Jatuhnya Keshogunan/Bakufu | 29 |
| D. Perubahan Kebijakan di Jepang Pasca Politik Sakoku | 34 |
| 1. Menghapus Hak Daimyo | 38 |
| 2. Menghapus Wilayah Feodal | 38 |
| 3. Memajukan Industri Jepang | 39 |
| 4. Menghapus Sistem Kelas Shinokosho | 39 |
| 5. Memajukan Bidang Pendidikan | 40 |
| 6. Memberlakukan Peraturan Wajib Militer | 41 |
| 7. Memperbaharui Pajak | 42 |
| 8. Membentuk Pemerintahan Konstitusional | 43 |
| E. Pengaruh Perubahan Kebijakan Pasca Politik Sakoku pada Masyarakat Jepang | 44 |

| | |
|-------------------------|----|
| BAB IV KESIMPULAN | 47 |
|-------------------------|----|

GLOSARI

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut sejarahnya, sejak didirikannya pada 660 SM, Jepang merupakan negara kekaisaran yang dipimpin oleh seorang Kaisar. Selanjutnya meski kedudukan kaisar tidak tergantikan, namun pada suatu masa Jepang pernah dipimpin oleh pemerintahan keshogunan yang berlangsung dari 1192 sampai 1868. Pemerintahan keshogunan berlangsung dalam 3 periode, yaitu periode Kamakura (鎌倉時代), Muromachi (室町時代) dan Tokugawa (江戸時代).

Rangkaian pemerintahan keshogunan yang juga disebut sebagai pemerintahan *Baku fu* adalah sebagai berikut. Setelah pemerintahan Kamakura berakhir pada 1333, dalam waktu singkat pemerintahan sempat kembali kepada kaisar yaitu dari 1333 sampai 1338. Berikutnya dilanjutkan oleh pemerintahan keshogunan yang kedua yang dikenal dengan keshogunan Muromachi yang berlangsung selama lebih dari dua abad yaitu dari 1338 sampai 1573.

Selama berkuasa lebih dari dua abad, kekuasaan keshogunan di Muromachi mendapat tantangan dari kelompok-kelompok saingannya di daerah-daerah lain di negeri itu. Jepang kemudian menjadi terpecah-pecah oleh perang saudara. Keadaan seperti itu baru dapat ditertibkan pada 1590 oleh Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi Hideyoshi meski telah menjadi pemenang dalam perang saudara tersebut, tetapi tidak

Hideyoshi meski telah menjadi pemenang dalam perang saudara tersebut, tetapi tidak serta merta dapat mendirikan keshogunan sebagaimana layaknya pemenang perang pada masa itu, karena pemerintahan keshogunan setelah Muromachi didirikan dan diperintah oleh Tokugawa Ieyasu. Pemerintahan keshogunan Tokugawa Ieyasu disebut keshogunan Edo.

Tokugawa Ieyasu menciptakan bentuk acuan bagi hampir setiap aspek dari kehidupan bangsa diantaranya, melakukan pembagian kelas masyarakat yang dikenal dengan sebutan *Shinokoso* dan dengan drastis menutup pintu Jepang dari dunia luar. Penutupan Jepang tersebut dilakukan karena kekhawatiran Jepang akan adanya misionaris. Keshogunan Tokugawa menyadari bahwa kekristenan mempunyai potensi yang sama dengan kekuatan senjata api yang datang bersamanya, maka akhirnya agama Kristen dilarang di Jepang dan keshogunan Tokugawa melarang masuk semua orang asing kecuali beberapa pedagang Belanda yang dibatasi di pulau kecil Deshima di Teluk Nagasaki. Penutupan diri Jepang tersebut tidak membuat hubungan dengan negara Barat benar-benar terputus karena melalui Deshima, Jepang dapat mengontrol dan memonopoli perdagangan antara Jepang dengan pihak-pihak luar. Pelarangan masuknya pihak asing ke Jepang tersebut disebut dengan Politik Sakoku (鎖国).

Pada saat Jepang masih melanjutkan politik sakoku, negara-negara Barat menyusun sistem negara modern sekaligus menuntut pembukaan Jepang. Tuntutan negara-negara tersebut untuk membuka Jepang dengan tujuan untuk meluaskan jangkauan perdagangannya ke Asia. Tujuan mereka tentunya tidak serta merta

membuat Jepang membuka negaranya, meski pada akhirnya Jepang dalam hal ini keshogunan Tokugawa harus mengabdikan tuntutan keras dari Amerika, sehingga pada 1853 dilakukan perjanjian persahabatan Jepang Amerika yang disebut *Nichibeiwashin jiyoyaku* (日米和親助役). Dalam perjanjian ini, pemerintahan keshogunan memperbolehkan kapal asing menggunakan 2 pelabuhan yaitu Shimoda dan Hokodate. Pada tahun yang sama menyusul perjanjian-perjanjian serupa dengan Rusia, Inggris dan Belanda sehingga Jepang kembali terbuka bagi dunia luar. Perjanjian-perjanjian tersebut di atas diubah empat tahun kemudian menjadi perjanjian perdagangan. Perjanjian yang serupa dibuat dengan Perancis. Kejadian-kejadian tersebut berdampak meningkatkan tekanan arus sosial dan politik yang menggerogoti fondasi struktur feodal yang ada pada zaman keshogunan Tokugawa. Selama kira-kira satu dasawarsa terjadi kekacauan besar, sampai sistem feodal keshogunan Tokugawa runtuh pada 1867.

Keruntuhan keshogunan Tokugawa sekaligus mengakhiri pemerintahan oleh shogun, karena pada 1868 kemudian kedaulatan dikembalikan kepada kaisar dalam Restorasi Meiji. Kaisar Meiji mengumumkan rencana politik pemerintahan baru yang dikenal dengan 5 pasal dekret, dengan bentuk bersumpah kepada Dewa. Di dalam 5 pengumuman resmi tersebut kaisar mengadakan tukar menukar pendapat untuk mengembangkan pembangunan politik dan ekonomi, kemudian Jepang menunjukan kepada seluruh dunia bahwa mereka akan membangun negaranya dengan menuntut ilmu pengetahuan dan untuk itu pemerintah Meiji memutuskan untuk membuat

negaranya sejajar dengan negara Barat dengan cara menerapkan kebijakan negara yang kuat.

Dalam penerapan kebijakan tersebut, pemerintah Meiji secara langsung membeli dan memasukan mesin-mesin dan teknologi canggih dari Amerika dan Eropa, juga membangun pabrik-pabrik yang dikelola oleh pemerintah, seperti pabrik senjata, pengolahan sutera dan pemintalan katun, juga membangun pertambangan serta memajukan industri modern. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan prasarana pos dan telegram, membangun rel kereta api antara Tokyo dan Yokohama, dan menetapkan Yen, Sen dan Rin sebagai sistem keuangan baru. Selain itu juga diberlakukan peraturan wajib militer, yaitu anak laki-laki yang berumur lebih dari 20 tahun harus melaksanakan kewajibannya sebagai pelayan militer.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang perubahan kebijakan yang terjadi dari zaman keshogunan ke zaman Meiji dengan tema Pengaruh Perubahan Kebijakan Pasca Politik Sakoku pada Masyarakat Jepang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini diawali dengan pemikiran bahwa politik sakoku di Jepang dijalankan dengan tujuan mempertahankan kebudayaannya dan menutup kemungkinan kebudayaan asing masuk ke Jepang termasuk dari negara-negara Barat.

namun pada kenyataannya, pada akhirnya pasca politik sakoku dijalankan, Jepang memutuskan untuk belajar ke Barat dan meniru semua dari Barat. ...

C. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan data tentang perubahan dan pengaruh perubahan kebijakan di Jepang pasca politik sakoku, maka penelitian ini dibatasi pada zaman Keshogunan sampai zaman Meiji.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Politik Sakoku?
2. Mengapa Jepang memutuskan belajar pada negara Barat?
3. Kapan Jepang memulai belajar pada negara Barat?
4. Bagaimana pengaruh perubahan kebijakan pasca Politik Sakoku pada masyarakat Jepang?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui:

1. Politik Sakoku.
2. Alasan Jepang belajar pada negara Barat.

3. Waktu memulai Jepang belajar pada Barat

4. Pengaruh perubahan kebijakan pasca Politik Sakoku pada masyarakat Jepang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti secara sistematis. Penelitian kualitatif menyajikan data yang dikumpulkan terutama dalam bentuk kata-kata, kalimat, atau gambar. Adapun teknik pengambilan data menggunakan metode dokumenter. Metode dokumenter merupakan salah satu jenis metode yang sering digunakan dalam metodologi penelitian sosial terutama dalam lingkup kajian sejarah. Data didapat dari buku-buku dan website internet.

G. Landasan Teori

Untuk menunjang penelitian ini penulis memakai teori:

1. Kebijakan

Kebijakan (*Policy*) adalah solusi atas suatu masalah. Kebijakan seringkali tidak efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan masalah. Dengan kata lain, kebijakan sebagai obat seringkali tidak manjur bahkan mematikan, akibat diagnosa masalah atau penyakitnya keliru (Dunn, 2003).

Kebijakan dipelajari dalam ilmu kebijakan (*Policy Science*), yaitu ilmu yang berorientasi kepada masalah kontekstual, multi disiplin, dan bersifat

normatif, serta dirancang untuk menyoroiti masalah fundamental yang sering diabaikan, yang muncul ketika warga negara dan penentu kebijakan menyesuaikan keputusannya dengan perubahan-perubahan sosial dan transformasi politik untuk melayani tujuan-tujuan demokrasi (Lasswell, HD dalam Kartodiharjo, 2009).

Menurut Kartasasmita dalam Widodo (2002:189) Kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya, (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.

Pendapat-pendapat tersebut di atas, dapat juga diperoleh suatu pengertian bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.¹

2. Politik Sakoku

Politik sakoku merupakan kebijakan luar negeri Jepang, yang mengatur bahwa orang asing yang tidak diizinkan memasuki Jepang maupun warga Jepang tidak diizinkan meninggalkan Jepang, dengan

¹ <http://edukasi.kompasiana.com/2011/11/11/1/apa-kebijakan-sosial-kebijakan-ekonomi-411564.html>

ancaman hukuman mati². Kebijakan ini dikeluarkan pada masa keshogunan Tokugawa, dengan tujuan membentuk identitas nasional Jepang, menghindari Jepang dari perang-perang besar, serta meredam pengaruh asing yang masuk ke Jepang.

H. Sistematika Penulisan

- Bab I,** Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, landasan teori dan sistematika penulisan.
- Bab II,** Merupakan pemaparan tentang zaman Keshogunan.
- Bab III,** Merupakan pembahasan tentang perubahan kebijakan di Jepang Pasca Politik Sakoku.
- Bab IV,** Kesimpulan.

² <http://id.wikipedia.org/wiki/Sakoku>